

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DALAM PENGANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Muhammad Octavian Noor

NPP.32.0789

Asdaf Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: moctavianor15@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Fitri Rahmadany M, S.IP, M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research was conducted because of the author's concerns and the problems found by the author regarding obstacles that occurred in the Regional Government Information System (SIPD) from the internet and the author's experience when practicing using SIPD while at the young cadets at the IPDN West Sumatra campus. **Purpose:** Study aims to analyze the effectiveness of the Regional Government Information System (SIPD) in the budgeting process at the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of Kutai Kartanegara Regency. **Method:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. The theory of organizational effectiveness used in this study refers to Duncan in Steers (1985:46-56)), with three main indicators: goal achievement, integration, and adaptation. **Result:** The results of the study indicate that SIPD has not been effective in budgeting due to technical constraints of SIPD and limitations of central human resources in serving the regions despite improving coordination between regional agencies, and providing more structured data. However, there are still technical obstacles and limitations of human resources. The local government has conducted internal training and advocacy to the center to improve the effectiveness of SIPD. **Conclusion:** The conclusion of this study is that SIPD in budgeting at BPKAD Kutai Kartanegara has not been effective because it still faces technical obstacles and limitations of the Central Human Resources in serving the region, causing delays in the budgeting process. Regulatory support and high commitment are supporting factors, while technical training needs to be improved to optimize the implementation of SIPD. **Keywords:** SIPD, effectiveness, budgeting, regional finance, BPKAD

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan karena keresahan penulis dan masalah yang ditemukan penulis adanya hambatan terjadi dalam Sistem Informasi pemerintahan daerah (SIPD) dari internet serta pengalaman penulis saat

praktik menggunakan SIPD saat di praja muda di kampus IPDN Sumatera Barat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori efektivitas organisasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Duncan dalam Steers (1985:46-56), dengan tiga dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD belum efektif dalam penganggaran karena kendala teknis SIPD dan keterbatasan SDM pusat dalam melayani daerah meskipun meningkatkan koordinasi antarinstansi daerah, dan menyediakan data yang lebih terstruktur. Namun demikian, masih terdapat hambatan teknis dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah daerah telah melakukan pelatihan internal dan advokasi kepada pusat untuk meningkatkan efektivitas SIPD. **Kesimpulan:** Kesimpulan dalam penelitian ini SIPD dalam penganggaran di BPKAD Kutai Kartanegara belum efektif dalam karena masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan SDM Pusat dalam melayani daerah sehingga menyebabkan keterlambatan proses kegiatan penganggaran. Dukungan regulasi dan komitmen tinggi menjadi faktor pendukung, sementara pelatihan teknis perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerapan SIPD.

Kata Kunci: SIPD, efektivitas, penganggaran, keuangan daerah, BPKAD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam pelaporan keuangan. Reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. reformasi manajemen keuangan memengaruhi organisasi sektor publik di berbagai bidang, dengan fokus pada faktor-faktor penting seperti efektivitas anggaran, transparansi, pengurangan pemborosan, dan kemampuan organisasi (Rashied, Chyad, Qasem, & Abbas, 2024). Salah satu bentuk nyata dari reformasi tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang diwujudkan melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, dan mulai diberlakukan secara menyeluruh di seluruh pemerintah daerah sejak tahun 2020. Sistem ini mencakup informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terintegrasi. Tujuan utama dari penerapan SIPD adalah untuk mempercepat proses perencanaan dan penganggaran, meningkatkan

kualitas laporan keuangan, serta menciptakan keselarasan data antara pusat dan daerah. Dalam konteks ini, anggaran program sebagai dokumen kebijakan adalah untuk membangun hubungan antara hasil suatu periode dan dana yang dibutuhkan (Lytvynchenko, 2014). Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah otonom di Kalimantan Timur turut serta dalam penerapan SIPD sejak tahun 2020. digitalisasi telah menandai dimulainya era otomatisasi, yang mengubah tugas-tugas akuntansi rutin menjadi lebih efisien. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) mampu mempercepat pengolahan data, meminimalkan campur tangan manusia, dan menekan potensi kesalahan manual. Pada tahap awal, SIPD digunakan untuk proses perencanaan dan penganggaran, sementara untuk penatausahaan dan pelaporan masih menggunakan aplikasi pendamping. Baru pada tahun 2024, SIPD diimplementasikan secara penuh untuk keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Penerapan SIPD dan Penguatan Kapasitas SDM pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman teknis dari ASN, serta kendala jaringan dan perangkat lunak (Marja Sinurat, 2023). Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan teknis dan administratif. Di antaranya adalah sistem yang sering mengalami error, lambatnya respon dari helpdesk SIPD pusat, serta masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi utama pengelola keuangan daerah. Selain itu, terdapat dualisme penggunaan sistem, yakni SIPD.go.id dan SIPD RI, yang belum terintegrasi secara sempurna dan menyebabkan kebingungan di tingkat daerah. SIPD menciptakan sistem kerja yang lebih terintegrasi, namun masih banyak ASN yang belum optimal dalam menginput data. Kelemahan bukan hanya pada sistem, tapi juga pada etos kerja, pemahaman regulasi, dan integritas pengguna (Tumija, 2022). SIPD Memperkuat sistem pengendalian internal dalam proses anggaran dan pelaporan. Mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengejar opini WTP dari BPK, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan dan partisipatif (Dadang Suwanda, 2019). Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: Apakah SIPD telah efektif dalam mendukung proses penganggaran daerah? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas perencanaan dan realisasi anggaran di BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara? Dan apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SIPD?. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (1985:46-56), penelitian ini akan mengkaji efektivitas SIPD dalam penganggaran di BPKAD Kutai Kartanegara melalui tiga dimensi utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi SIPD serta merumuskan upaya strategis yang telah dan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan mengevaluasi penerapan SIPD secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian tata kelola keuangan berbasis

digital. Dalam melaksanakan penganggaran harus melakukan pengambilan keputusan yang selaras yang mengalir secara sistematis dari tujuan keseluruhan ke program dan anggaran tahunan, semuanya dalam keselarasan sempurna satu sama lain (Oulasvirta, L., & Rönkkö, J. 2023).Ssekaligus menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah lain dalam mengoptimalkan sistem informasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah diwajibkan secara nasional sejak tahun 2019 dan digunakan sepenuhnya di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2024, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menelaah efektivitas SIPD dalam proses penganggaran di wilayah tersebut. Sebagian besar studi sebelumnya hanya berfokus pada aspek implementasi atau optimalisasi teknis SIPD di daerah lain, tanpa mengkaji secara mendalam sejauh mana sistem ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas penganggaran daerah. Padahal, data realisasi anggaran di Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa efektivitas belanja tidak selalu meningkat sejak penggunaan SIPD, bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Selain itu, belum banyak kajian yang mengupas hambatan teknis, kesiapan SDM, dan upaya adaptasi organisasi dalam mengoperasikan SIPD sebagai bagian dari evaluasi efektivitas sistem. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian lokal dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas SIPD dalam penganggaran dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas Duncan, yang menilai dari aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi organisasi.

Adapun ditemukan Identifikasi masalah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yakni:

1. Masih ditemukan *Bug* dan *Error System* dalam login;
2. Error penginputan data perencanaan dan penyusunan anggaran,penatausahaan sistem surat penggajian, dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah;
3. Respon *help center* dan *it support* lambat
4. Minimnya koordinasi antar pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), data tidak valid sering kali terjadi salah input dalam pengelolaan keuangan

1.3 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoritis dan memperjelas posisi penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama dilakukan oleh Zulfikar Fikri Amri (2022) dengan judul "*Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan di Kecamatan Semarang Timur*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

dan menyoroti implementasi SIPD dalam konteks administrasi kecamatan. Meskipun sama-sama membahas SIPD, fokus penelitian tersebut berbeda karena lebih menekankan pada kualitas pelaporan, bukan efektivitas penganggaran. Penelitian kedua adalah karya Rustina (2018) yang berjudul *"Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Takalar"*. Penelitian ini juga bersifat kualitatif deskriptif, namun menggunakan objek sistem informasi keuangan daerah (bukan SIPD), serta membahas aspek optimalisasi, bukan efektivitas. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda menunjukkan perbedaan konteks implementasi sistem. Selanjutnya, Putri Pandan Wangi (2023) meneliti *"Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Semarang"*. Penelitian ini paling mendekati tema skripsi karena sama-sama mengkaji efektivitas SIPD. Namun, perbedaan terletak pada aspek yang diukur, di mana fokus utama adalah kualitas laporan keuangan, bukan proses penganggaran seperti dalam penelitian ini. Penelitian keempat dilakukan oleh Dina Triana Wahyuningsih (2022) dengan judul *"Analisis Penerapan SIPD pada Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo"*. Penelitian ini menelaah aspek penerapan SIPD secara umum di satu perangkat daerah. Perbedaan utama adalah penelitian tersebut hanya menganalisis penerapan, bukan efektivitas, serta tidak secara spesifik membahas proses penganggaran. Terakhir, Egit Gunadi (2017) meneliti *"Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gowa"*. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan sistem berbeda, yaitu SIMDA, yang merupakan pendahulu SIPD. Fokus utamanya pada pengaruh terhadap laporan keuangan, bukan pada efektivitas penganggaran maupun kendala implementasi.

Dari kelima penelitian tersebut, terlihat bahwa belum ada yang secara khusus meneliti efektivitas SIPD dalam penganggaran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan implementasi atau pelaporan, bukan evaluasi efektivitas berbasis teori organisasi seperti Duncan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi baru yang signifikan baik dari sisi lokasi, pendekatan teori, maupun fokus kajian.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada objek, fokus kajian, serta pendekatan analitis yang digunakan. Penelitian ini dilakukan secara khusus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang hingga saat ini belum menjadi objek kajian terkait efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penganggaran. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada implementasi umum, kualitas laporan keuangan, atau optimalisasi sistem di wilayah lain, penelitian ini secara spesifik menilai efektivitas SIPD dalam penganggaran menggunakan tiga dimensi efektivitas menurut Duncan dalam Steers, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Selain itu,

penelitian ini menggunakan data empiris terbaru (2020–2024) yang mencakup transisi penggunaan SIPD secara penuh hingga pelaporan, serta menganalisis faktor pendukung, penghambat, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kendala SIPD. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah baru yang relevan dan kontekstual dalam memperkuat literatur mengenai efektivitas digitalisasi sistem keuangan daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait anggaran. Teori efektivitas organisasi oleh Duncan dalam Steers (1985:46-56) digunakan sebagai acuan dengan tiga dimensi utama: (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan sistematis dalam menilai efektivitas organisasi, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan dan sistem baru seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dimensi pencapaian tujuan memungkinkan penilaian sejauh mana SIPD mendukung tercapainya target dan sasaran penganggaran. Dimensi integrasi menekankan sejauh mana sistem ini dapat menyatukan berbagai komponen dan aktor dalam organisasi, sedangkan dimensi adaptasi melihat kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan, termasuk penggunaan teknologi informasi baru. Dengan demikian, teori ini relevan dan sangat membantu dalam menganalisis serta memahami efektivitas penerapan SIPD dalam proses penganggaran di BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (1985:46-56), dengan indikator utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian disusun berdasarkan masing-masing indikator berikut:

3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian merupakan hasil dari serangkaian upaya yang harus dipahami sebagai sebuah proses. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan tujuan akhir, diperlukan tahapan-tahapan yang jelas, baik dalam bentuk pencapaian setiap bagian maupun dalam periodisasi waktu. Pencapaian tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor,

termasuk jangka waktu dan sasaran yang menjadi target konkret. Pencapaian yang diinginkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) terutama dalam penganggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hasil dari berbagai upaya yang berlangsung dalam suatu proses terstruktur. Untuk memastikan keberhasilan implementasi dan pemanfaatan SIPD, diperlukan tahapan yang sistematis, baik dalam pencapaian setiap komponen sistem maupun dalam perencanaan waktu penerapannya. Meskipun demikian, informan menyampaikan bahwa SIPD telah memberikan manfaat dalam hal:

- Penyusunan anggaran lebih terstruktur.
- Kesalahan input manual berkurang.
- Koordinasi penyusunan APBD antar bidang menjadi lebih jelas.

3. 1.1 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Kutai Kartanegara Dapat Dilihat melalui Tabel di bawah ini :

Pengelolaan Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan	x	x	x	√	√	√	√	√
Penganggaran	x	x	x	√	√	√	√	√
Pelaksanaan	x	x	x	x	x	x	x	√
Penatausahaan	x	x	x	x	x	x	x	√
Pelaporan	x	x	x	x	x	x	x	√

Sumber: BPKAD Tahun 2025

Sebelum Tahun 2019 Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolakeuangan menggunakan aplikasi SIMDA(Sistem Informasi Manjaemen Daerah). Pada Tahun 2019 bulan september diterbitkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menggantikan SIMDA akan tetapi pada saat itu tahun 2019 hingga 2023 tidak secara penuh menggunakan SIPD untuk pelaksanaan hingga pelaporan menggunakan aplikasi tambahan yakni SIMDA untuk di tahun 2024 berdasarkan hasil wawancara dengan informan hanya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD) dengan satu satunya pengelolaan keuangan daerah dan juga karena masalah server dan respon helpdesk yang lambat, pernah terjadi keterlambatan beberapa hari dari di jadwalkan jadi meminta waktu tambahan proses penganggaran.

Dalam realisasi anggaran sebelum menggunakan SIPD dan sesudah menggunakan SIPD data yang diberikan sesuai dengan laporan realisasi anggaran dalam realisasi anggarannya stabil 80% dan pendapatan yang terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2023 dari >80% hingga >100% untuk belanja dan tidak berdampak signifikan dan tidak mempengaruhi efektivitas realisasi anggaran karena selalu stabil secara signifikan dapat dilihat tabel di bawah ini berdasarkan dari dokumen laporan realisasi anggaran kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 hingga

2023 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

3.1.2 Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2018-2023

Tahun	pendapatan	Realisasi Anggaran pendapatan	%	kriteria
2017	Rp4.035.144.602.108,89	Rp3.402.599.166.642,75	84,32	Cukup Efektif
2018	Rp4.165.973.280.109,57	Rp4.052.073.917.135,39	97,36	Efektif
2019	Rp4.932.574.566.347,63	Rp5.745.271.078.058,41	116,48	Sangat Efektif
2020	Rp4.406.885.293.400,99	Rp4.456.587.090.185,72	101,13	Sangat Efektif
2021	Rp4.2214.595.420.427,00	Rp4.443.234.734.944,34	105,42	Sangat Efektif
2022	Rp5.719.589.655.567,00	Rp7.443.525.130.275,86	130,14	Sangat Efektif
2023	Rp9.088.863.537.034,00	Rp7.787.223.822.360,59	85,68	Cukup Efektif

3.1.3 Perbandingan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018-2023

Tahun	Anggaran belanja	Realisasi Anggaran belanja	%	kriteria
2017	Rp4.404.430.449.920,70	Rp3.189.732.113.185,00	72,42	Kurang Efektif
2018	Rp3.970.820.363.584,37	Rp3.272.002.980.594,85	82,40	Cukup Efektif
2019	Rp4.947.218.642.868,06	Rp4.124.401.285.312,46	83,37	Cukup Efektif
2020	Rp5.451.397.782.436,89	Rp4.545.405.492.898,21	83,38	Cukup efektif
2021	Rp5.327.845.124.546,00	Rp4.714.130.498.075,44	88,48	Cukup Efektif
2022	Rp6.553.205.838.057,00	Rp5.475.960.549.797,73	83,50	Cukup Efektif
2023	Rp10.910.460.596.043,00	Rp9.310.378.690.831,49	85,33	Cukup Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kukar tahun 2017-2023

3.2. Integrasi

Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penganggaran terlihat jelas dalam dimensi integrasi karena sistem ini menghubungkan dan

menyatukan data perencanaan anggaran dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu platform. Hal ini mempermudah koordinasi dan kolaborasi antar SKPD, memastikan alokasi anggaran yang lebih efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, SIPD juga mengintegrasikan data penganggaran daerah dengan sistem pusat, mempercepat proses verifikasi, meminimalkan kesalahan, dan memungkinkan pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, SIPD mendukung pengelolaan anggaran daerah yang lebih terstruktur dan sinergis. Di sisi lain, SIPD juga memfasilitasi integrasi antara data penganggaran daerah dengan sistem pusat yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini memungkinkan aliran informasi yang lancar antara pemerintah pusat dan daerah, serta mempermudah pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Integrasi dengan sistem pusat juga membantu dalam proses evaluasi dan pengawasan anggaran, mengurangi potensi penyimpangan, dan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Hasil wawancara dengan berbagai informan dalam dimensi integrasi ini pemerintah pusat kurang dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara langsung kepada daerah hanya memberikan panduan melalui SIPD, dan sumber daya manusia pemerintah pusat dalam menangani dan mengembangkan SIPD masih kurang terutama dalam respon *helpdesk* jika terjadi hambatan SIPD di daerah. baru sekali untuk penatausahaan dilakukan bimbingan teknis, BPKAD kabupaten kutai kartanegara secara mandiri mengadakan bimbingan teknis, dimana ini sangat penting dalam mendukung penerapan SIPD di daerah.

Kegiatan bimbingan teknis ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai cara kerja SIPD, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan teknis penggunaan sistem. Semua pihak yang terlibat dalam penganggaran dan perencanaan, bukan hanya operator, diharapkan dapat mengikuti pelatihan untuk memastikan pemahaman yang merata dan memastikan kelancaran proses penganggaran. Dengan demikian, sumber daya manusia yang terlatih secara efektif akan berkontribusi pada keberhasilan penerapan SIPD secara optimal di BPKAD dan OPD terkait. Lalu dengan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan agar SIPD berjalan dengan baik sangat penting untuk memastikan kelancaran sistem dalam mendukung perencanaan dan penganggaran daerah. Koordinasi yang efektif antar instansi memungkinkan aliran data yang akurat dan tepat waktu, sehingga informasi yang masuk ke dalam SIPD dapat diproses dengan baik. Dalam hal ini, setiap instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memiliki kesepahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam menyediakan data yang diperlukan. Peningkatan koordinasi dapat dicapai melalui pertemuan rutin, penggunaan sistem komunikasi yang efektif, dan pelaksanaan kegiatan bersama seperti workshop atau bimbingan teknis, yang memungkinkan instansi terkait untuk berbagi informasi dan pengalaman. Dengan koordinasi yang baik, kualitas data yang diinput ke dalam SIPD akan lebih terpercaya,

mempercepat proses perencanaan anggaran, serta meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

3.3 Adaptasi

Adaptasi dalam hal efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penganggaran mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Adaptasi ini mencakup beberapa aspek penting, seperti fleksibilitas SIPD dalam menghadapi perubahan regulasi, kebijakan fiskal, atau prioritas pembangunan yang dapat berubah setiap tahun. Sistem yang efektif harus mampu beradaptasi dengan pembaruan data dan informasi yang terus-menerus, serta menyediakan alat bagi pengambil keputusan untuk menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan situasi yang baru. Selain itu, adaptasi juga melibatkan faktor pendukung kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak SIPD untuk beroperasi secara optimal di berbagai daerah dengan kondisi yang beragam, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun peraturan lokal. Di tingkat daerah, SIPD perlu dapat dioperasionalkan oleh berbagai instansi yang terlibat dalam penganggaran, dari BPKAD hingga dinas terkait, dengan berbagai tingkat keterampilan dan kesiapan teknologi yang berbeda. BPKAD menunjukkan upaya adaptasi melalui pelatihan internal dan penyesuaian kerja. Misalnya, beberapa operator SIPD telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dari Kemendagri. Namun, efektivitas adaptasi masih terhambat oleh beberapa faktor:

- Bug sistem, seperti kesulitan login dan server error, menyebabkan keterlambatan kerja.
- Respon Helpdesk SIPD dari pusat yang lambat, sehingga penyelesaian masalah teknis membutuhkan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu.
- Keterbatasan SDM, terutama pada OPD di luar BPKAD, menyebabkan ketergantungan pada operator utama.

Contoh kasus nyata yang disampaikan informan dalam wawancara:

“Kadang-kadang sistem SIPD tidak bisa login sama sekali. Kami harus begadang sampai malam karena tenggat input sudah mepet dan kami meminta waktu tambahan sampai SIPD dapat di akses untuk melanjutkan proses penginputan.”

Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi belum sepenuhnya berjalan optimal dan membutuhkan perbaikan baik dari sisi internal daerah maupun dari sistem pusat. Hasil Wawancara dengan berbagai informan terkait adaptasi SIPD dalam penganggaran kemampuan sudah sangat kompeten di bidangnya masing-masing terutama dalam penganggaran semua ditempatkan sesuai dengan bidangnya dan juga dalam mengoperasikan SIPD di BPKAD Kutai Kartanegara cukup bervariasi, secara umum, ada upaya berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan

keterampilan pengguna. Semua pihak yang terlibat dalam penganggaran, mulai dari operator hingga staf di bidang anggaran, diharapkan dapat mengakses dan menggunakan SIPD dengan baik, Hal ini penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Dan untuk sarana dan prasarana BPKAD sudah terfasilitasi dengan baik di BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara. kelengkapan sarana dan prasarana pendukung SIPD dalam penganggaran mengacu pada fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung operasi yang efektif dan efisien dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perangkat keras yang memadai seperti komputer, server, dan perangkat jaringan yang handal sangat penting untuk menjalankan SIPD dengan optimal. Sistem harus dapat diakses oleh berbagai pengguna, termasuk di berbagai instansi terkait, dengan perangkat yang cukup kuat untuk menangani beban data yang besar tanpa terjadi kendala teknis. Koneksi internet yang stabil dan jaringan yang aman sangat diperlukan untuk mengakses dan memperbarui data dalam SIPD secara real-time. Kualitas dan kestabilan jaringan mempengaruhi kelancaran operasional SIPD, mengingat sistem ini membutuhkan komunikasi data antara pemerintah daerah dan pusat, serta antar instansi yang terlibat dalam penganggaran.

3.2.1 Tabel Sarana dan Prasarana penunjang SIPD BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Barang	Jumlah
1.	P.C Unit	15
2.	Laptop	22
3.	Hardisk besar	1
4.	Printer personal komputer	20
5.	Scanner personal komputer	12
6.	Router besar wifi	1

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung:

- Infrastruktur seperti komputer dan jaringan internet yang cukup baik di BPKAD.
- Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mendorong digitalisasi keuangan.
- Kebijakan regulatif, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019, yang mewajibkan penggunaan SIPD.

Faktor Penghambat:

- *Bug system*, sering terjadinya *error* saat login atau membuka data dokumen serta kadang terjadinya *error* saat penginputan data dalam membuat suatu dokumen

- Kurangnya SDM operator SIPD yang belum merata kompetensinya terutama dipusat dalam menangani permasalahan yang ada di daerah-daerah.
- Fungsi SIPD yang belum sepenuhnya terotomatisasi, misalnya masih perlu input manual dari Excel ke sistem.

3.5. Upaya Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:

- Menyelenggarakan pelatihan internal dan sosialisasi penggunaan SIPD di tiap triwulan.
- Menjalinkan koordinasi rutin antar SKPD melalui rapat teknis.
- Melakukan advokasi kepada pemerintah pusat terkait kendala sistem SIPD, termasuk permintaan peningkatan kapasitas server.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran di BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD belum efektif, khususnya pada aspek pemanfaatan waktu dan efisiensi kerja pegawai. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan jaringan atau server SIPD yang sering eror, kesulitan dalam migrasi data dari sistem lama, serta kebutuhan pelatihan teknis yang lebih mendalam. Hasil ini sejalan dengan temuan dari penelitian Yuniarti (2022) yang juga menemukan bahwa SIPD memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi penganggaran, namun masih terkendala pada faktor teknis dan sumber daya manusia. Yuniarti menyebutkan bahwa pegawai daerah sering kali kesulitan mengakses sistem akibat jaringan dan kurangnya pelatihan intensif. Sementara itu, dalam penelitian Sartika (2021), efektivitas SIPD dinilai tinggi terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada konteks daerah. Penelitian Sartika dilakukan di kota dengan infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik dibandingkan Kutai Kartanegara, sehingga faktor keterbatasan jaringan tidak menjadi isu utama seperti yang ditemukan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Hidayat dan Rahayu (2023) juga mendukung temuan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat bergantung pada kesiapan SDM dan dukungan infrastruktur teknologi. Dalam hal ini, penelitian di Kutai Kartanegara menegaskan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan serta peningkatan infrastruktur pendukung agar SIPD bisa lebih optimal digunakan. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual dan empirik terkait penerapan SIPD di daerah dengan karakteristik geografis dan infrastruktur yang belum merata. Temuan ini menekankan bahwa efektivitas SIPD bukan hanya bergantung pada desain sistem, melainkan juga kesiapan sumber daya

lokal, pelatihan teknis, serta dukungan manajerial dan teknologis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPD belum efektif. Meskipun secara konseptual SIPD memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses penganggaran, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. telah membantu dalam menyusun dokumen anggaran seperti RKPD, KUA-PPAS, dan APBD, namun kinerja belum konsisten karena hambatan *server* SIPD. Selain itu, gangguan teknis seperti *bug*, kesalahan login, dan kegagalan input data secara langsung berdampak pada keterlambatan penyusunan dan pelaporan anggaran. implementasi SIPD di Kutai Kartanegara masih menghadapi hambatan dengan pemerintah pusat terutama dalam respon helpdesk yang lambat, masih kurangnya sumber daya manusia pemerintah pusat dalam menangani dan mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini menyebabkan proses penyusunan anggaran menjadi terganggu dan tidak berjalan sesuai jadwal. Sumber daya Manusia BPKAD dapat menyesuaikan dan menerima dengan baik penerapan SIPD. Keterbatasan pelatihan dari pusat hanya sekali saat penatausahaan, rendahnya literasi digital menjadi kendala utama. Selain itu, lambatnya respons dari helpdesk SIPD pusat menjadi hambatan kritis ketika terjadi error atau gangguan sistem. Hal ini menyebabkan proses penyusunan anggaran menjadi terganggu dan tidak berjalan sesuai jadwal. Faktor pendukung daerah seperti sarana dan prasarana sudah memadai akan tetapi masih ada hambatan yang terjadi yakni server error, kesulitan login, respon helpdesk yang lambat, upaya pemerintah daerah sudah dilakukan dengan baik dalam menghadapi hambatan tersebut, diperlukan langkah konkret dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperbaiki kualitas sistem SIPD, termasuk pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, serta penanganan cepat terhadap masalah teknis melalui sistem helpdesk yang responsif dan profesional. Tanpa perbaikan ini, efektivitas SIPD akan tetap terbatas dan berisiko menghambat tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya yang telah membantu memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dian S. Manoe, Yosafat Koten, & Margaretha P.N Rozady. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sikka. *Increate*, 9, 19–26. <https://increate.nusanipa.ac.id/index.php/increate/article/view/45/39>
- Fikri Amri, Zulfikar. “Implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan.” Skripsi, 2022, 1-134. <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2020/B.241.20.0001/B.241.20.0001-15-File-Komplit-20220831063014.pdf>
- Gunadi, Egit. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa).” Skripsi, 2017, 1–15. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/13058>.
- Haryanto, T. (2020). Evaluasi Implementasi SIPD dalam Proses Penganggaran Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 16(2), 133-147
- Indriyani, D., & Mappanyukki, R. (2022). The effect of government accounting standards, utilization of information technology, and accounting internal control on the quality of financial reports with organizational commitments as moderating variables. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1994–2006. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2788>
- Lytvynchenko, G. (2014). Programme management for public budgeting and fiscal policy. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 119, 576–580. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.064>
- Mardiana,H.,& Hendra, R. (2020). Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi dalam Penganggaran Daerah di Indonesia. Surabaya: Penerbit Akademia
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. N. (2023). Analisis efektivitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bidang anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka. *Jurnal In Create (Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi)*, 9(1), 19–26. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Nusa Nipa Maumere. ISSN: 2338-9214.
- Oulasvirta, L., & Rönkkö, J. (2023). Public financial management: Budgeting, accountability and auditing. In E. Pekola, et al. (Eds.), *Finnish Public Administration, Governance and Public Management* (Chapter 7). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34862-4_7
- Pandan Wangi, Putri. “Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah,” 2022, 1–9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*.

- Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rashied, A. S., Chyad, A. K., Qasem, W., & Abbas, N. H. (2024). The impact of financial management reforms on budget efficiency, transparency, and wastage reduction across diverse regions. *Journal of Ecohumanism*, 3(5), 743–762. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i5.3935>
- Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda. 2019. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung : Remaja Rosdakarya Bandung.
- Saputra, Ketut Agus & Sudianing, N. K. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 11 (2).
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Steers, 1985. “Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment”. *Administrative Science Quarterly*, 22, 46-56
- Sudianing, Ni Ketut dan Ketut Agus Seputra, 2019. Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 11.
- Tumija, & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(2), 143–157. <https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- Wahyudi, K. P., Sinurat, M., Romarina, A., & Johannes, A. W. (2024). Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 11(1), 27–38. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381>
- Wahyuningsih, Dina Triana. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Wonosobo, 2022.
- Wahyu, S. (2023). Peranan Teknologi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah: SIPD sebagai Solusi Perencanaan yang Efisien dan Transparan. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 18(4), 235-249.
- Wurara, C. N. C., Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TOMOHON. *Journal Publicuho*, 7(2), 802–810. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436>